

**TINJAUAN PERANAN PT JASA RAHARJA DALAM PEMBERIAN BIAYA
DAN SANTUNAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU-LINTAS
JALAN DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WARNI

NIM: 10500111123

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

**TINJAUAN PERANAN PT JASA RAHARJA DALAM PEMBERIAN BIAYA
DAN SANTUNAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU-LINTAS
JALAN DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WARNI

NIM: 10500111123

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Warni
NIM : 10500111123
Tempat/Tgl. Lahir : Tanetea, 16 November 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/S1/Hukum Perdata
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Samata
Judul : Tinjauan Peranan PT Jasa Raharja dalam Pemberian Biaya
dan Santunan kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar,
Penyusun,

WARNI
NIM: 10500111123

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw. Keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Peranan PT Jasa Raharja dalam Pemberian Biaya dan Santunan kepada Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan di Kota Makassar” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada Allah swt atas Rahmat, Berkah, Nikmat Iman dan Islam, Ampunan-Nya serta kesempatan untuk menikmati kehidupan dan isinya. Pada Rasulullah, Muhammad saw sebagai teladan ummat manusia sepanjang zaman yang membawa manusia pada perubahan dan kebaikan yang sebenarnya. Orang tua tercinta, ayahanda Dg.Baso.R dan Ibunda Maemunah, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya

baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, serta kesabarannya. Juga saudara-saudariku Syarifuddin, S.T, Syamsiah, S.Pd, Ani Safitri, S.E dan Sumarlin yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya.

Penulis juga menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. A. Qadir Gassing HT, M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Prof. Dr. H. Thib Raya, M.A. selaku PGS Rektor UIN Alauddin Makassar
3. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, II, dan III yang selalu meluangkan waktunya.
4. Dr. Hamsir, S.H, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, sekaligus menjadi penasehat akademik selama 4 tahun.
5. Istiqamah, S.H, M.H, selaku sekretaris jurusan ilmu hukum.
6. Eman sulaiman, S.H, M.H, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Drs.M. Thahir Maloko, M.Hi, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Ilmu Hukum atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan Ilmu Hukum hingga saat ini.

9. Para sahabat Viqhi Alansari W, Yuliana, Nirma, yang selalu bersama di bangku kuliah serta selalu memberikan semangat hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
10. Mukhlis Nakajemo, Hajar (om yeyenk), dan Syahrul Ramadan yang telah banyak membantu selama bimbingan dan penelitian penulis.
11. Teman-teman selama kuliah Yogi Prayugo, Shita Lestari, Sulaiman, Nurkholik majid, Ria Miftahul, Zulkifli Nur, Trisna Mayasari, dan Ilmu Hukum Angkatan 2011 khususnya Ilmu Hukum 7, Kakanda Yusran yg banyak membantu.
12. Teman-teman kost Kiki, Dila, Lina, Dian, Fatimah, Bunda Rahma, Afril, Lani, Sasi, Ana dan khususnya Masdar Fitrah yang selalu memberikan dukungan dan doa serta berbagi makanan selama berada di kost.
14. Zaki Cambang, Nurul Izzah Hakim, Yogi Hadi Afrizal yang menjadi teman selama KKNP hingga saat ini.

Besar harapan saya kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah swt, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Samata, 21 Maret 2015

Penyusun

Warni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kerangka Dasar Teoritis.....	9
1. Teori Peran.....	9
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	11
3. Teori Moral	14
4. Teori Keadilan	16
5. Teori Perjanjian.....	18
B. Perjanjian dalam Asuransi Bermotor	19
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor.....	19
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi	21
3. Berakhirnya Asuransi Bermotor	22
C. Sejarah PT Jasa Raharja	24
D. Pengertian Hukum Asuransi.....	27
E. Peran dan Tanggungjawab PT Jasa Raharja.....	29
1. Peran PT Jasa Raharja.....	29
2. Tanggungjawab PT Jasa Raharja.....	30
BAB III METODEODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrument Penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Asuransi PT Jasa Raharja Kota Makassar	40
B. Peranan PT Jasa Raharja dalam Pemberian Biaya dan Santunan kepada Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.....	43
1. Peranan atau Tugas Utama PT Jasa Raharja.....	43
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi Oleh Korban Kecelakaan untuk Mendapatkan Biaya dan Santunan.....	43
3. Besarnya Biaya dan Santunan yang diberikan Kepada Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan	46
4. Korban yang diberikan Biaya dan Santunan.....	48
5. Sumber Dana dan Santunan yang diberikan Kepada Korban.....	49
C. Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab PT Jasa Raharja di Kota Makassar.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Warni

NIM : 10500111123

**Judul : TINJAUAN PERANAN PT JASA RAHARJA DALAM PEMBERIAN
BIAYA DAN SANTUNAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN
LALU-LINTAS JALAN DI KOTA MAKASSAR**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan PT Jasa Raharja dalam pemberian biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* ke dalam beberapa submasalah atau tujuan penelitian, yaitu: 1) mengetahui peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di kota Makassar, 2) mengetahui apakah peranan dan tanggungjawab PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di kota Makassar sudah terlaksana dengan baik.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan normatif dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer (masyarakat) dan sekunder (peraturan Perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli). Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peranan dan tanggungjawab PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar masih kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Askep) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Askel). Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang tidak mendapatkan biaya dan santunan dari PT Jasa Raharja dan pemberian biaya dan santunan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu-lintas jalan.

Implikasi dari penelitian ini: 1) penerapan peranan PT Jasa Raharja dalam pemberian biaya dan santunan yang harus sesuai dengan Undang-undang. 2) Peranan dan tanggungjawab PT Jasa Raharja dalam pemberian biaya dan santunan harus terlaksana sebagaimana ketentuan dari Undang-undang.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Peranan PT. Jasa Raharja dalam Pemberian Biaya dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Makassar", yang disusun oleh Warni, NIM: 10500111123, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diseleggarakan pada hari Selasa, tanggal 09 April 2015 M, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 09 April 2015 M.
19 Jumadil Awal 1436 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Subehan Khalik, S.Ag., M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Eman Sulaiman, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)

Diketahui oleh:



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 195704141986031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi di Indonesia sudah mengalami peningkatan yang begitu signifikan, khususnya dibidang transportasi. Moda transportasi sangatlah dibutuhkan oleh setiap orang, karena setiap kegiatan yang dilakukan itu membutuhkan alat transportasi. Namun, seperti yang telah diketahui, tidak selamanya aktifitas tersebut berjalan sesuai dengan keinginan para pelaksananya, karena dalam aktifitas transportasi yang ada diseluruh wilayah Indonesia relatif padat, khususnya di Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan banyak pula penduduk di Kota Makassar yang merupakan pendatang, baik itu pekerja maupun pelajar. Semakin padatnya aktifitas transportasi tersebut memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pengguna transportasi, karena hal-hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan hidup bagi para pengguna transportasi.

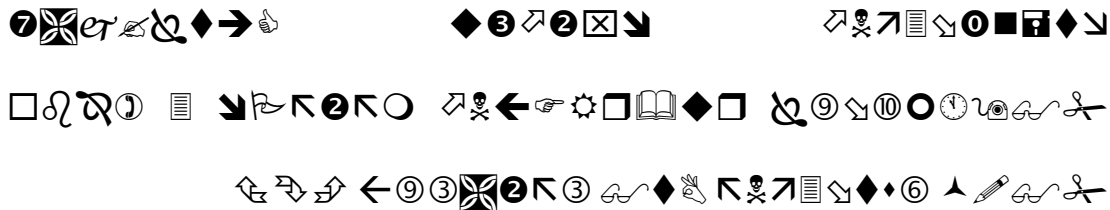
Hal yang paling sering terjadi adalah kerugian yang disebabkan karena kecelakaan. Untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak kerugian tersebut, maka para pengguna transportasi, seperti pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan umum menggunakan banyak metode atau pilihan, salah satunya dengan mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak lain, yakni melalui perusahaan asuransi, dalam hal ini asuransi PT Jasa Raharja. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergiat di bidang asuransi sosial (kecelakaan) untuk memberikan ganti kerugian (biaya dan santunan) kepada setiap korban kecelakaan lalu-lintas jalan.

Di dalam hukum dan pergaulan hukum, dikenal dengan istilah subjek hukum yaitu manusia pribadi dan badan hukum. Di Indonesia badan hukum itu dapat berupa perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum) dan sebagainya, baik yang diadakan oleh pemerintah (BUMN) maupun yang dialami oleh pemerintah atau badan hukum dari konstruksi keperdataan/privat. Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum tersebut secara tuntas memang tidak diatur di dalam nash (al-Qu'ran), namun dalam hadits Nabi lazim disebut dengan istilah syarikat (serikat) yaitu dalam bentuk kerjasama. PT Jasa Raharja sebagai subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban dapat melakukan tindakan hukum (melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajibannya) apabila melakukan perikatan dengan pihak lain.

Dalam ajaran atau syariat Islam yang bersumber dari al-Qu'ran ini ditentukan bahwa, agar setiap subjek hukum senantiasa memenuhi perjanjian yang dilakukannya dengan subjek hukum lain, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Maidah/5:1, yaitu:





Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”¹

Tafsirnya:

“akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah swt dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syaikh As Sa’diy berkata, “ini merupakan perintah Allah swt kepada hamba-hamban-Nya yang mukmin untuk mengerjakan konsekuensi daripada iman, yaitu memenuhi janji, yakni menyepurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi”. Hal ini mencakup akad (perjanjian) yang dilakukan antara seorang hamba dengan Tuhannya berupa mengerjakan ibadah kepada-Nya, mengerjakannya secara sempurna, tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Demikian juga mencakup antara seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan menaatinya dan mengikutinya, mencakup pula antara seseorang dengan kedua orang tuanya dan kerabatnya, yakni dengan berbakti kepada mereka dan menyambung tali silaturahmi dengan mereka dan tidak memutuskannya. Demikian pula akad antara seseorang dengan kawan-kawannya berupa mengerjakan hak-hak persahabatan di saat kaya dan miskin, lapang dna sempit. Termasuk pula akad antara seseorang dengan yang lain dalam akad mu’amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya”.²

Akad (perjanjian) yang dimaksud dalam tafsir QS.al-Maidah/5:1 tersebut adalah perjanjian antara seseorang dengan lainnya, pemerintah melakukan perjanjian dengan masyarakatnya. Pemerintah berjanji untuk memenuhi jaminan sosial yang

¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet.I; Bandung: Syamil Qur’an, 2012), h.106.

²*Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* dalam [http://www.tafsir al-Qur’an.co.id/](http://www.tafsir.al-Qur'an.co.id/), diakses tanggal 18/1/2014, pukul 19:00.

harus diberikan kepada masyarakat yang berupa asuransi sosial (biaya dan santunan) dan masyarakat berhak atas jaminan sosial itu.

Selanjutnya di dalam Konstitusi Negara RI, mengenai Jaminan Sosial bagi setiap orang yang diatur dalam pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Pernyataan tentang jaminan sosial dalam pasal diatas juga dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perasuransian di Indonesia pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”

Aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN dinyatakan pula dalam pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Adapun perusahaan asuransi kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat adalah perusahaan asuransi PT Jasa Raharja, yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum. Yang mana iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban akibat kecelakaan lalu-lintas jalan. Hal itu juga dinyatakan dalam pasal 3 sub 1c Undang-

undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, bahwa:

“Turan wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti kerugian yang berhubungan dengan kematian dan cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang”

Penjelasan tentang mengganti kerugian yang disebabkan karena kecelakaan lalu-lintas jalan ini juga terdapat dalam isi pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberikan ganti kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Penjelasan diatas bertujuan pokok untuk memberikan biaya dan santunan kepada setiap anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu-lintas jalan. Yang mana perusahaan asuransi PT Jasa Raharja yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjalankannya.

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi sekarang, menurut penelitian penyusun skripsi ini, masih terdapat beberapa orang anggota masyarakat korban kecelakaan lalu-lintas jalan Kota Makassar yang tidak mendapatkan biaya dan santunan dari perusahaan asuransi PT Jasa Raharja di Kota Makassar sebagaimana mestinya, dan ada juga anggota masyarakat lainnya yang mendapat biaya dan santunan dari perusahaan asuransi PT Jasa Raharja Kota Makassar, namun tidak sesuai dengan ganti kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun melakukan suatu penelitian dengan judul ***“Tinjauan Peranan PT Jasa Raharja dalam pemberian Biaya dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di kota Makassar?
2. Apakah peranan dan tanggungjawab PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di kota Makassar sudah terlaksana dengan baik?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan penelitiannya mengenai Tinjauan Peranan PT Jasa Raharja dalam Pemberian Biaya dan Santunan kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peranan dari perusahaan asuransi PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar. Perusahaan ini bergerak di bidang asuransi sosial yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang mana pemerintah yang memberikan wewenang kepada PT Jasa Raharja untuk memberikan asuransi sosial kepada setiap korban.

D. Kajian Pustaka

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Peranan PT Jasa Raharja dalam pemberian Biaya dan Santunan kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di Kota Makassar*”. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku yang membahas tentang asuransi. Adapun buku-buku tersebut, yaitu: pertama, buku karya Hasan Ali yang berjudul “*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2004). Buku ini memfokuskan pembahasannya pada konsep dasar hukum Islam dan hubungannya dengan realita, baik itu asuransi dalam perspektif ekonomi konvensional-sejarah, konsep dan praktiknya, landasan operasional, dan produk asuransi syariah di Indonesia.

Kedua, buku karya Abdul Rahim Mallaweang yang berjudul “*Bank dan Lembaga Syariah Non Bank*”, (Makassar: Gunadarma, 2013). Buku ini memfokuskan tentang Dasar-dasar Perbankan, Asuransi, BMT, Reksadana, Pasar Modal, BPRS dan Pegadaian.

Ketiga, buku karya Sri Redjeki Hartono yang berjudul “*Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*”, (Semarang: IKIP Semarang, 1985). Buku ini memperkenalkan hukum asuransi pada umumnya dan bagaimana bentuk dari perusahaan asuransi,

Adapun buku-buku referensi atau penelitian-penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun, yaitu penelitian berkaitan dengan peranan perusahaan asuransi, khususnya PT Jasa Raharja yang ada di Kota Makassar. Adapun penelitian ini akan memfokuskan tentang peranan PT Jasa Raharja dalam pemberian biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas Jalan di Kota Makassar.

E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran suatu teori yaitu menguji kebenaran teori peran dari Robert Linton

2. Kegunaan Penelitian

- **Kegunaan ilmiah**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan asuransi

- **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan pembangunan masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Dasar Teoritis

1. Teori Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti seperangkat tingkat yang dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Mengenai istilah peranan, dimaksudkan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹ Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan atau profesi, maka seseorang yang diberi atau mendapatkan suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut *role expectation*. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan factor lainnya.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.I., Jakarta: PT. Gramadia Pustaka, 2008). H.667.

Menurut Robert Linton, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi actor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Kemudian sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran.²

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Gross, Masson, dan McEachren mendefenisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.³

²*Teori Peran (Rhole Theory)* dalam <http://rinawahyu42.wordpress.com/>, diakses tanggal 20/04/2013, pukul 16:00 wib.

³*Defenisi peran atau peranan* dalam <http://id.shuoong.com/humanities.theory-criticism>, diakses tanggal 22/04/2013 pukul 14.30 wib.

Peran yang dilakukan seseorang atau badan hukum termasuk perseroan terbatas (PT), tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurangberhasilan ini terwujud dalam konflik peran (*role conflict*) dan adanya harapan bertentangan dengan peran (*role strain*).

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Setiap manusia apapun profesi dan pekerjaannya dan bagaimanapun perannya harus mempunyai rasa tanggungjawab, dimana rasa tanggungjawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah kita lakukan. Arti dari tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggungjawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung segala akibatnya.

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggungjawab itu bersifat kodrati artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggungjawab. Apabila dikaji tanggungjawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Tanggungjawab adalah cirri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Dari beberapa teori hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah teori tentang tanggungjawab hukum oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah tanggungjawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam Kamus Hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan merujuk hamper semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bertanggung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban tanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek huku, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴

Tanggungjawab (*responsibility*) adalah merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan akan kewajibannya. Seorang professional dalam hal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus dilandasi dengan kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dalam memberikan pelayanannya, professional itu bertanggungjawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggungjawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang professional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggungjawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggungjawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari

⁴Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 335-337.

pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.⁵

3. Teori Moral

Tanggungjawab dan prinsip moral dan kebaikan bermoral bukanlah suatu yang bertentangan antaranya untuk dibuat pilihan tetapi merupakan perkaitan dalam aspek tingkah laku yang bermoral. Memiliki cirri-ciri kebaikan yang berlandaskan kepada panduan dan peraturan moral di atas memperbolehkan seseorang itu untuk membentuk dirinya mencapai peringkat berakhlak mulia dan seterusnya dapat bertindak ke arah kebaikan menerusi alasan-alasan yang berdasarkan persekitaran yang berwujud.

Kata moral berasal dari bahasa Latin *Moralis-mos*, *moris* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup.⁶ Moral terkait dengan kegiatan manusia dari sisi baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat. Sidi Gazalba menyatakan, bahwa moral dalam bahasa Indonesia disebut susila.⁷ Kata susila memiliki arti antara lain: baik budi bahasanya, sopan santun, kesopanan, keadaban, pengetahuan tentang adab, dan ilmu adab. Selanjutnya Gazalba menyatakan bahwa moral itu sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang

⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 60.

⁶Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 672.

⁷Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat* (Cet.IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 512.

tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Dia menyimpulkan bahwa moral itu adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.⁸

Teori moral merangkumi sejumlah pendekatan bagi memahami bagaimana, kenapa, dan pada paham apa seseorang patut menilai sesuatu, idea, objek, atau seseorang yang lain. Penyiasatan ini bermula pada falsafah silam, di mana dia dikenali sebagai axiology atau etik. Penyiasatan ahli falsafah awal mencari pemahaman buruk dan baik konsep “baik”. Masa kini kebanyakan teori nilai merupakan rekaman empirikal saintifik mengenai apa yang dinilai oleh seseorang dan coba memahami mengapa mereka menghargainya dari konteks psikologi, sosiologi, dan ekonomi.

Menurut Immanuel Kant, moralitas adalah hal keyakinan serta sikap batin dan bukan hanya sekedar hal penyesuaian dengan beberapa aturan dari luar, entah itu berupa aturan negara, hukum agama, ataupun hukum adat-istiadat.

Dalam kamus filsafat terdapat beberapa pengertian dan arti moral yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh (dipengaruhi oleh) keinsyafan benar atau salah, kemampuan untuk mengarahkan (mempengaruhi) orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku nilai benar dan salah.

⁸Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, h. 512.

- b. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam berhubungan dengan orang lain.
- c. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dipandang baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat.
- d. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima, menyangkut apa yang dianggap benar, adil dan pantas.

4. Teori keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*justice*” memiliki persamaan arti dengan *justicia*, dalam bahasa Latin, *jeuge*, *Justicia* (f) dalam bahasa Prancis, *juez* (m), *justicia* (f) dalam bahasa Spanyol, *reichter* (m), *gerechtigkeit* (f) dalam bahasa Jerman.⁹

Keadilan hanya bias dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁰

⁹Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Liberty, 1999), h. 38.

¹⁰Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 223.

John Rawls, filsur Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.”¹¹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”. Berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan dan menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹² Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi Asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹³

John Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan yang menjadi rujukan beberapa ahli: prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), dan prinsip ketiga persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).¹⁴

¹¹Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, no. 1 (April 2009): h. 139-140.

¹²Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, h. 139-140.

¹³Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, h. 139-140.

¹⁴Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, h. 139-140.

5. Teori Perjanjian

Salah satu teori perjanjian adalah teori *Gevaarzetting*. Teori ini menekankan kepada perbuatan manusia atau pihak-pihak dalam perjanjian bahwa setiap orang harus bertanggungjawab sendiri terhadap kekeliruan dari ucapan, tulisan, dan sikap atau isyaratnya. Prinsip dari teori tersebut menjadi logis karena siapapun yang melakukan kekeliruan dan membahayakan atau merugikan orang lain, maka ia harus bertanggungjawab. Betapa banyak orang akan menanggung kerugian apabila pihak yang merugikan dapat dibebaskan dari tanggungjawab hanya karena alasan “keliru” melakukan suatu perbuatan (menyatakan kehendapak dalam perjanjian).

Dengan demikian, menurut teori ini bahwa setiap orang atau pihak harus menerima konsekuensi terhadap perbuatannya sendiri dalam bentuk kewajiban menanggung segala perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya, apabila teori ini dijadikan pegangan, maka setiap orang atau pihak dalam mengadakan perjanjian akan lebih berhati-hati menyatakan kehendaknya baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau sikap dan isyarat sebagai wujud dari kehendaknya, karena teori ini tidak memperdulikan apakah orang atau pihak itu dalam menyatakan kehendaknya keliru atau tidak. Oleh karena itu, Pitlo dan Vollmar berpendapat bahwa setiap orang yang turut serta dalam pergaulan hidup, harus menerima konsekuensi bahwa tindakan dan ucapannya bisa ditafsirkan oleh pihak lain menurut arti yang dianggap patut oleh anggota masyarakat bersangkutan.¹⁵, sehingga setiap tindakan dan ucapan salah satu

¹⁵J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, h. 203-204.

pihak dalam menyatakan kehendak menurut teori ini tidak memperdulikan apakah ia keliru atau tidak, yang jelas tindakannya itu harus dipertanggungjawabkannya, karena kalau tidak pihak lain bisa mengalami kerugian.

B. Perjanjian dalam Asuransi Bermotor

1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen, karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya pasal 1 ayat (2): Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.¹⁶

Asuransi kendaraan bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap resiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam polis kendaraan

¹⁶Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan Bermotor* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.10.

bermotor Indonesia. Secara garis besar, jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis:¹⁷

a. *Comprehensive/All Risk* (kerugian gabungan) memberi jaminan terhadap:

1. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
2. Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebutseizin tertanggung.
3. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
4. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
5. Sambaran petir.

b. Total loss Only (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
2. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.

¹⁷Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, h.10.

3. Resiko sendiri untuk resiko kendaraan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati diawal, sedangkan pada jaminan *comprehensive (all risk)*, teranggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat resiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan.¹⁸

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi

a. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Hak-hak Tertanggung meliputi:

1. Menerima polis (Surat Perjanjian Asuransi).
2. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa.
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Kewajiban Tertanggung meliputi:

1. Membayar premi.
2. Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang-barang yang dipertanggungkan.¹⁹
3. Mencegah agar kerugian dapat dibatasi.²⁰

¹⁸Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, h.10.

¹⁹Republik Indonesia, *Wet Van Kophanel*, pasal 251

²⁰Republik Indonesia, *Wet Van Kophanel*, pasal 283

4. Kewajiban khusus yang mungkin disebut didalam polis.

b. Hak dan Kewajiban Penanggung

Hak-hak Penanggung meliputi:

1. Menerima premi
2. Menerima pemberitahuan keadaan sebenarnya dari tertanggung.
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

Kewajiban Penanggung meliputi:

1. Memberikan polis terhadap tertanggung.
2. Menggani kerugian dalam asuransi ganti rugi dan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam asuransi.
3. Melaksanakan premi restorno²¹ kepada tertanggung yang beritikad baik berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

Beberapa bagian diatas adalah hak dan kewajiban dari tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

3. Berakhirnya Asuransi Bermotor

Perjanjian asuransi berakhir apabila:²²

- a. Perjanjian waktu berlaku sudah berakhir

²¹Republik Indonesia, *Wet Van Kophanel*, pasal 281

²²Gani djemat, *Menyusun Perjanjian Leasing untuk Lessor dan Lessee* (Jakarta: Asosiasi Leasing Indonesia, 1984), h. 87.

Perjanjian asuransi biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan di dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir

b. Perjalanan berakhir

Asuransi berdasarkan perjanjian ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan.

c. Terjadinya evenemen diikuti klaim

Didalam polis dinyatakan bahwa terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila pada saat asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti rugi ini dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Berhentinya asuransi dapat juga terjadi karena faktor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan resiko setelah asuransi berjalan (pasal 293 dan 638 KUHD).

e. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat di dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan, kemudian barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Dengan demikian, asuransi bukan dibatalkan atau batal dengan asuransi adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.²³

C. Sejarah PT Jasa Raharja

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut:²⁴

²³Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: IKIP Semarang, 1985), h. 50.

²⁴*Sejarah PT. Jasa Raharja* dalam <http://www.jasaraharja.co.id/>, diakses tanggal 19/11/2014, pukul 14:53 wib.

- a. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsen, Fa. Sluimers & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.
- b. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.
- c. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.
- d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak berhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.²⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja' dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang

²⁵*Sejarah PT. Jasa Raharja* dalam <http://www.jasaraharja.co.id/>, diakses tanggal 19/11/2014, pukul 14:53 wib.

Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965. Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir Nomor 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT

(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang di buat dihadapan Yulius Purnawan, S.H. MSi., Notaris Jakarta.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Nomor 34 tahun 1964.

D. Pengertian Hukum Asuransi

Istilah asuransi dalam perkembangan di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri itu sebenarnya istilah asli dari bahasa belanda akan

tetapi berasal dari bahasa latin, yaitu “*assurandeur*” yang berarti “penanggung” keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa belanda. Sedangkan dalam bahasa belanda istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung segala sesuatu yang pasti terjadi dan istilah *assurance* itu lebih dikaitkan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.²⁶

Hukum asuransi atau ketentuan mengenai asuransi diatur dengan peraturan Perundang-undangan dan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selain itu, hukum asuransi juga berkaitan dengan hukum perdata dan karenanya pengaturan mengenai hukum asuransi juga dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keterkaitan antara hukum asuransi dengan hukum perdata terjadi karena asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum perdata. Sedangkan adanya keterkaitan antara hukum asuransi dan hukum dagang karena hukum asuransi merupakan bagian dari hukum dagang dan pengaturan mengenai hukum asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pada pasal 246 yang menyebutkan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada

²⁶Abdul Rahim Mallaweng. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2013), h. 27.

tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen atau peristiwa tidak pasti.

Unsur-unsur asuransi yang terkandung dalam pengertian diatas antara lain:

- Adanya kepentingan
- Adanya peristiwa tidak tentu
- Adanya kerugian

E. Peran dan Tanggungjawab PT Jasa Raharja

1. Peran PT Jasa Raharja

Peran dalam kamus bahasa Indonesia yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat sedangkan definisi peranan yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.²⁷

Peranan PT Jasa Raharja merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan yang dalam hal ini berperan untuk memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi. Dimana bentuk pertanggungannya berupa biaya dan santunan yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi kepada pihak teranggung dalam hal ini bertindak selaku korban dari kecelakaan yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen atau peristiwa tidak pasti.

²⁷Ilham, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Jaya Publissher, 2010), h. 308

2. Tanggungjawab PT Jasa Raharja

Tanggung jawab dalam kamus bahasa indonesia didefinisikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Di dalam istilah Belanda disebutkan Verantwoordelijk atau bertanggung jawab yaitu wajib mengadakan pertanggungjawaban, serta memikul tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kerugian.²⁸

1. Tanggungjawab Secara Hukum

Suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu Undang-Undang dan perjanjian. Di dalam perikatan yang muncul karena Undang-Undang, lahirnya perikatan tersebut tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, namun kehendak itu berasal dari si pembuat Undang-Undang, sedangkan perikatan yang muncul akibat perjanjian lahirnya perikatan tersebut karena para pihak menghendakinya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu (yang mereka kehendaki). Hubungan hukum penanggung dengan tertanggung dalam asuransi dapat timbul baik karena suatu perjanjian maupun karena Undang-Undang. Hubungan hukum karena perjanjian terdapat didalam asuransi komersial, sedangkan hubungan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang terdapat dalam asuransi sosial. Hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dari pihak penanggung dalam asuransi selalu didasarkan dan dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tentu (*evenement*).

²⁸Iman Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982, hal. 211

Apabila peristiwa tidak tentu (*evenemt*) itu terjadi dan menimbulkan kerugian, sedangkan terjadinya peristiwa itu ada kaitannya dengan beberapa peristiwa lain, maka untuk menentukan tanggungjawab dari penanggung maka terlebih dahulu ditentukan peristiwa manakah diantara peristiwa-peristiwa itu yang menjadi sebab terjadinya kerugian.

Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ada 2 (dua) hubungan hukum pertanggung yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu:

- a. Hubungan hukum pertanggung PT Jasa Raharja (Persero) dengan perusahaan/pemilik kendaraan bermotor yang diharuskan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 2
- b. Hubungan hukum pertanggung PT Jasa Raharja (Persero) dengan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4.

Sebagai akibat dari kedua hubungan hukum tersebut, disatu pihak PT Jasa Raharja (Persero) berhak untuk menuntut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari pemilik kendaraan bermotor, dan dilain pihak ia berkewajiban membayarkan santunan kepada setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang dapat meninggal dunia, luka-luka/cacat sementara, dan cacat tetap. Dalam hal ini PT Jasa Raharja (Persero) bertanggungjawab memenuhi

kewajiban Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 untuk menyalurkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Adapun Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu:

- a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
- b. Traktor, bulldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Khusus mengenai ruang lingkup tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa; “ setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam pasal 1, dana akan memberikan kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah”. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa,“ untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu”

Dalam menyatakan hak atas santunan asuransi social kecelakaan lalu lintas jalan oleh tertanggung atau ahli warisnya harus membuktikan telah terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan yang menimpa dirinya atau anggota keluarganya.

Disamping itu harus dibuktikan jenis kerugian yang diderita korban, apakah berupa meninggal dunia, luka-luka/cacat sementara, atau cacat tetap. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dapat memberikan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas apabila telah ada pembuktian korban kecelakaan lalu lintas jalan dari pihak Satlantas Polres setempat. Dimana didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang berhak mendapatkan santunan disebutkan:

- a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Tanggungjawab kepada Masyarakat

Sesuai dengan tujuan pendirian PT Jasa Raharja untuk mengutamakan kebutuhan rakyat dan menuju masyarakat yang adil, PT Jasa Raharja juga memberikan bantuan sosial dan kemasyarakatan , diantaranya yaitu:

- a. Bantuan peningkatan kesehatan, PT Jasa Raharja (Persero) dalam sector kesehatan melakukan kegiatan donor darah, sunatan massal, pengobatan gratis, posyandu,dsb, dalam merealisasikan program bantuan tersebut pada tahun 2011 PT Jasa Raharja (Persero) telah menyalurkan dana bantuan peningkatan kesehatan sebesar Rp. 2.067.719.561
- b. Bantuan pendidikan dan pelatihan, komitmen PT Jasa Raharja (Persero) dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal khususnya generasi muda dari

tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, tidak hanya terbatas pada pembangunan Sumber Daya Manusia, namun pembangunan penunjang pendidikan juga menjadi perhatian. Pada tahun 2011 PT Jasa Raharja (Persero) telah merealisasikan bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.084.511.380, bantuan tersebut disalurkan untuk pemberian beasiswa bagi anak berprestasi, pelatihan, pengadaan komputer, alat tulis, pengadaan kelengkapan perpustakaan beserta buku-buku pelajaran, dan prasarana kegiatan belajar mengajar.

- c. Bantuan sarana ibadah, PT Jasa Raharja telah berupaya memberikan bantuan pembangunan dan renovasi sarana ibadah seperti Mesjid, Gereja, dan Pura, dimana pada tahun 2011 PT Jasa Raharja (Persero) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 2.454.919.660,- yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
- d. Bantuan sarana dan prasarana umum, PT Jasa Raharja (Persero) melalui program Bina Lingkungan telah banyak memberikan bantuan antara lain pembangunan gedung sekolah, yayasan/panti asuhan, pembangunan fasilitas dan peralatan olahraga, pembangunan saluran air, pos kelurahan, pos kamling, pembangunan jalan, yang tersebar diseluruh Indonesia. Selama tahun 2011 bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 3.099.633.550.

BAB III

METEODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan perusahaan asuransi dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapa hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, khususnya pada wilayah kerja PT Jasa Raharja.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan normatif (*hukum positif*) yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data kepustakaan tentang problematika dalam pemberian santunan asuransi. Pendekatan terhadap hukum normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai

norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit.

2. Pendekatan yuridis yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan perusahaan asuransi dalam memberikan biaya dan santunan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di perusahaan PT Jasa Raharja dan masyarakat yang terdaftar menjadi anggota di perusahaan tersebut. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan (library Research) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan masyarakat yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya serta para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut.

b. Observasi

Yaitu melakukan pencatatan peranan perusahaan asuransi dan pelaksanaan dari peranan yang disesuaikan dengan Undang-Undang.

c. Studi Dokumentasi

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Serta menelaah buku-buku dan hasil penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah daftar pertanyaan, gambar-gambar. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penyusun dalam pengolahan dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Asuransi Jasa Raharja Kota Makassar (Sulawesi Selatan)

Perusahaan asuransi PT Jasa Raharja di Kota Makassar (Sulawesi Selatan) adalah salah satu kantor cabang dari 28 kantor cabang perusahaan asuransi PT Jasa Raharja yang kepala cabang dari PT Jasa Raharja adalah Dr. Ir. Hj. Sulistianingtias, MM.AAI-K, bertempat di Jl. Dr. Syam Ratulangi No.77, Makassar, Tlp/faks. (0411) 872988, 873495/ 853559, e-mail: Makassar@jasaraharja.co.id. Kantor cabang PT Jasa Raharja kota Makassar memiliki tiga kantor perwakilan, yaitu:

1. Perwakilan parepare

Bertempat di Jl. Baumasape No.170, Parepare

Tlp/faks. (0421) 3312006

2. Perwakilan Watampone

Bertempat di Jl. Ahmad Yani No.18.

Tlp/faks. (0481) 22964/ 23464

3. Perwakilan Palopo

Bertempat di Jl. Andi Djemma No.150 (ruko depan Tugu Adipura Binturu) Waru Selatan, Palopo.

Tlp/faks. (0471) 22533

Adapun struktur organisasi kantor cabang PT Jasa raharja Sulawesi Selatan (Makassar) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Bertugas mengepalai PT Jasa Raharja (persero) Kantor cabang Sulawesi Selatan dan semua masalah yang ada disini harus dapat diselesaikan oleh kepala cabang sebagai penanggungjawabnya. Disamping itu juga memeriksa kelancaran kerja dari bawahannya dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PT Jasa Raharja (persero) kantor cabang Sulawesi Selatan.

2. Bidang Operasional Pelayanan

Bidang operasional pelayanan ini mempunyai tugas yang terdiri dari:

- a. Mengambil data kecelakaan
- b. Melakukan jemput bola
- c. Survey
- d. Penyelesaian santunan
- e. Pelaporan

3. Samsat

Samsat ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan)
- b. pelaporan

4. Bidang Keuangan

Bidang keuangan ini mempunyai tugas:

- a. Membayar santunan
- b. Membuat pembukuan
- c. pelaporan

Dari beberapa gambaran diatas, yang menjadi bidang visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan kebutuhan masyarakat.

b. Misi

Misi yang diberikan oleh PT Jasa Raharja pada dasarnya sama dengan tugas-tugas dari BUMN lainnya yaitu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan koperasi.

Berdasarkan tujuan dan lapangan usaha yang dijalankan oleh PT Jasa Raharja, maka ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. Skep./06/II/1999. Tanggal 22 februari 1999 tentang Visi dan Misi perusahaan PT Jasa Raharja.

B. Peranan PT Jasa Raharja dalam Pemberian Biaya dan Santunan kepada Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan

1. Peranan atau tugas utama PT Jasa Raharja

Membayarkan santunan kepada korban atau ahli waris korban yang berada dalam ruang lingkup jamin Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu-lintas Jalan Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban kecelakaan untuk mendapatkan biaya dan santunan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap korban untuk mendapatkan biaya dan santunan dari pihak perusahaan asuransi PT jasa Raharja adalah sebagai berikut:

- a. Bagi korban yang mengalami luka-luka
 - Mengisi formulir pengajuan Santunan (yang disediakan oleh Jasa Raharja secara gratis)
 - Formulir Keterangan Kesehatan korban akibat Kecelakaan yang diisi oleh Rumah Sakit/ Puskesmas/ Dokter yang merawat korban. (Blanko dari Jasa Raharja)

- Copy laporan Polisi/ Syahbandar atau Instansi yang berwenang lainnya
 - Copy SIM/STNK kendaraan yang terlibat kecelakaan
 - Kuitansi Asli biaya pengobatan perawatan korban
 - Foto Rontgen (jika diperlukan)
 - Copy KTP Korban/ Ahli Waris korban
- b. Bagi korban meninggal dunia
- Mengisi formulir pengajuan Santunan (yang disediakan oleh Jasa Raharja secara gratis)
 - Formulir Keterangan Kesehatan korban akibat Kecelakaan yang diisi oleh Rumah Sakit/ Puskesmas/ Dokter yang merawat korban. (Blanko dari Jasa Raharja)
 - Formulir Keterangan Ahli Waris yang diisi oleh kepala Desa/ Lurah dimana domisili ahli waris tinggal (formulir dari Jasa Raharja)
 - Copy laporan Polisi/ Syahbandar atau Instansi yang berwenang lainnya
 - Copy SIM/STNK kendaraan yang terlibat kecelakaan
 - Kuitansi Asli biaya pengobatan perawatan korban
 - Copy KTP Korban/ Ahli Waris korban
 - Copy Akta Nikah/ Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Dalam wawancaranya, Bapak Sabir juga menegaskan hal yang sama tentang peranan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap korban kecelakaan lalu-

lintas jalan, dia mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi korban adalah sebagai berikut:¹

- a. Bagi korban yang mengalami luka-luka
 - Mengisi formulir pengajuan Santunan (yang disediakan oleh Jasa Raharja secara gratis)
 - Formulir Keterangan Kesehatan korban akibat Kecelakaan yang diisi oleh Rumah Sakit/ Puskesmas/ Dokter yang merawat korban. (Blanko dari Jasa Raharja)
 - Copy laporan Polisi/ Syahbandar atau Instansi yang berwenang lainnya
 - Copy SIM/STNK kendaraan yang terlibat kecelakaan
 - Kuitansi Asli biaya pengobatan perawatan korban
 - Foto Rontgen (jika diperlukan)
 - Copy KTP Korban/ Ahli Waris korban
- b. Bagi korban meninggal dunia
 - Mengisi formulir pengajuan Santunan (yang disediakan oleh Jasa Raharja secara gratis)
 - Formulir Keterangan Kesehatan korban akibat Kecelakaan yang diisi oleh Rumah Sakit/ Puskesmas/ Dokter yang merawat korban. (Blanko dari Jasa Raharja)

¹Sabir, Humas PT Jasa Raharja, *wawancara*, 13 Februari 2015.

- Formulir Keterangan Ahli Waris yang diisi oleh kepala Desa/ Lurah dimana domisili ahli waris tinggal (formulir dari Jasa Raharja)
- Copy laporan Polisi/ Syahbandar atau Instansi yang berwenang lainnya
- Copy SIM/STNK kendaraan yang terlibat kecelakaan
- Kuitansi Asli biaya pengobatan perawatan korban
- Copy KTP Korban/ Ahli Waris korban
- Copy Akta Nikah/ Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Dalam pemberian biaya dan santunan kepada korban kecelakaan Lalu-lintas jalan, pihak PT Jasa Raharja kota Makassar melihat dari kategori-kategori sebagai berikut:

- Meninggal dunia
- Cacat tetap
- Biaya perawatan
- Biaya penguburan

3. Besarnya Biaya dan Santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 februari 2008 telah ditetapkan tentang besarnya biaya dan santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan adalah sebagai berikut:

a. Santunan bagi Korban Kecelakaan Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai,/Danan, Ferry/penyeberangan laut:

- Meninggal dunia Rp. 25.000.000.00.-
- Cacat tetap (Maksimum) Rp. 25.000.000.00.-
- Biaya Perawatan (Maksimum) Rp. 10.000.000.00.-
- Biaya Penguburan Rp. 2.000.00.-

b. Santunan bagi korban Kecelakaan Alat angkutan Penumpang Umum di Udara:

- Meninggal dunia Rp. 50.000.000.00.-
- Cacat tetap (Maksimum) Rp. 50.000.000.00.-
- Biaya Perawatan Rp. 25.000.000.00.-
- Biaya Penguburan Rp. 2.000.00.-

Dalam wawancaranya, bapak Sabir selaku bagian Humas dari PT Jasa Raharja di Kota Makassar menyatakan bahwa besarnya biaya dan santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 februari 2008. Dan dalam wawancara tersebut, Bapak sabir juga menyatakan bahwa besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja cabang Sulawesi Selatan kepada korban atau ahli waris korban periode tahun 2014 adalah sebesar Rp. 48.427.253.791,-.²

²Sabir, Humas PT Jasa Raharja, *Wawancara*, 13 Februari 2015.

4. Korban yang diberikan biaya dan santunan

Ada dua kelompok yang diberikan biaya dan santunan yaitu:

- a. Korban kecelakaan penumpang yang berada dalam ruang lingkup jaminan Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965: *“setiap penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.”*
- b. Sementara korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang berada dalam ruang lingkup jamin Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 yaitu: “
- c. Korban pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu-lintas(ditabrak kendaraan bermotor di jalan) yang berada dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, PP No.18 Tahun 1964 tentang ketentuan pelaksanaannya dalam pasal 10 (sepuluh) poin 1 (satu) dijelaskan bahwa “setiap orang yang berada di luar angkutan Lalu-lintas Jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberikan hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13 (tigabelas). Artinya, bahwa pejalan

kaki, pengendara sepeda dayung dan pengguna jalan lainnya, apabila ditabrak oleh kendaraan bermotor di jalan, maka korban tersebut berhak atas dana santunan dari PT Jasa Raharja.

5. Sumber dana Santunan yang diberikan kepada korban

Dana yang dipergunakan untuk membayar dana santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas yaitu dari masyarakat sendiri. Maksudnya:

- a. Bagi korban kecelakaan alat angkutan umum diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaannya. Setiap penumpang alat angkutan umum yang sah, membayar ongkos/sewa tersebut angkutan darat yang harus disetorkan oleh pemilik/pengusaha alat angkutan tersebut kepada Jasa Raharja.
- b. Bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan Jo. No.18 tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaannya. Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melunasi/membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat, salah satu komponennya adalah SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan), yang harus disetorkan ke Jasa Raharja.

Besar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan) yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Sepeda motor dibawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari SWDKLLJ
- b. Traktor, bulldozer, forklift, mobil Derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah)
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooteer diatas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 32.00.00 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- d. Sepeda motor diatas 250 cc sebesar Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah)
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp. 140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp. 87.000.00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container sejenisnya sebesar Rp. 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

***C. Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab PT Jasa Raharja di Kota Makassar
(Sulawesi Selatan)***

Pelaksanaan pemberian biaya dan santunan PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Bapak Sabir (Humas PT Jasa Raharja Kantor Cabang sulsel) menyatakan bahwa pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu-lintas yaitu:³

- a. Jasa Raharja saat ini telah memiliki program pelayanan jemput bola yang sudah lama dilakukan. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja Kota Makassar dalam memberikan Biaya dan santuan kepada korban kecelakaan menerapkan sistem jemput bola langsung kepada masyarakat korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana apabila terlebih dahulu telah mendapat laporan kecelakaan dari Satlantas Polres setempat yang dikirim melalui telegram. Yang mana dengan sistem yang dilakukan tersebut masyarakat mulai mengetahui peranan dari PT Jasa Raharja (Persero) tersebut, yang sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.
- b. Petugas PT Jasa Raharja setiap hari atau dua hari sekali selalu mendatangi Satlantas Polres Makassar untuk mendata apakah pada hari tersebut ada kecelakaan atau tidak.

³Sabir, Humas PT Jasa Raharja, *Wawancara*, 13 Februari 2015.

- c. Apabila ada kecelakaan yang meninggal di TKP, maka petugas PT Jasa Raharja akan langsung datang ke rumah korban untuk menyampaikan bela sungkawa yang selanjutnya membantu proses kelengkapan administrasi klaim untuk bisa mengejar target penyelesaian pembayaran klaim kurang dari 7 (tujuh) hari.

Penyusun juga melakukan wawancara langsung kepada beberapa korban yang pernah menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar tentang peranan yang diberikan Jasa Raharja di Kota Makassar. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yeyen, seorang pegawai koperasi adil makmur mengalami kecelakaan lalu lintas jalan (tabrakan) di sungai saddang dengan luka patah tulang lengan kiri dengan total biaya pengobatan Rp. 3.000.000.00.-. Yeyen menyatakan bahwa pada saat kecelakaan terjadi tidak ada seorangpun dari pihak asuransi yang berada di tempat kejadian, bahkan anggota polres makassar yang bertugas melakukan pelaporan teradinya kecelakaan juga tidak ada di tempat. Hal ini yang membuat korban kecelakaan tidak tahu menahu tentang adanya santunan yang akan diberikan oleh pihak asuransi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang.⁴
2. Adi Wardani Putra, 26 tahun, seorang mahasiswa Universitas Indonesia Timur mengalami kecelakaan lalu-lintas jalan, korban

⁴Yeyen, Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, *Wawancara*, 19 Februari 2015.

menyatakan bahwa dia diserempet oleh mobil taxi di Jl.Dg. Tata II yang menyebabkan dirinya mengalami luka patah tulang kaki kanan dengan total biaya pengobatan sebesar Rp. 3.500.000.00.-. pada saat wawancara, Adi menyatakan bahwa biaya pengobatannya ditanggung sendiri oleh pihak keluarga, dalam hal ini, Adi tidak tahu tentang adanya santunan yang disediakan oleh pihak asuransi.⁵

3. Ikhsan Sudirman, seorang mahasiswa yang berumur 22 tahun, bertempat tinggal di Sudiang, menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Jl. Perintis Kemerdekaan dan akibat kecelakaan tersebut Ikhsan mengalami cacat, dan biaya pengobatannya adalah Rp. 10.000.000.00.-, dalam kecelakaan tersebut Iksan mengatakan bahwa ada pihak asuransi yang datang ditempat kejadian dan Ikhsan mendapatkan asuransi dari pihak PT Jasa Raharja sebesar Rp. 10.000.000.00.-.⁶

4. Rihyat, 22 tahun, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa, seorang mahasiswa yang mengalami kecelakaan di Jl. Hertasning dan mengalami luka ringan dengan biaya pengobatan Rp. 1.500.000.00.-. dalam kecelakaan tersebut Rihayat mengatakan bahwa tidaka ada pihak dari

⁵Adi Wardani Putra, Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, *Wawancara*, 19 Februari 2015.

⁶Ikhsan Sudirman, Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, *Wawancara*, 1 Maret 2015.

polres maupun asuransi yang datang ke tempat kejadian, dan Rihayat tidak tahu tentang adanya asuransi yang harusnya diberikan kepadanya.⁷

5. Ravika Rahman. Mahasiswa yang berumur 25 tahun, bertempat tinggal di Jl. Abdullah Dg, Sirua menjadi korban kecelakaan di Jln. Urip Sumoharjo, akibatnya Ravika mengalami patah tulang kaki kanan dan menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000.00.-, Ravika menyatakan tidak ada asuransi yang didapatkannya dari pihak PT Jasa Raharja, padahal pada saat kejadian pihak polres ada di tempat kejadian.⁸

6. Wahyu Indra, mahasiswa berumur 22 tahun menjadi korban kecelakaan di Jl. Pettarani, korban mengalami luka ringan dengan biaya pengobatan Rp. 1.350.000.00.-, dan biaya itu ditanggung sendiri karena tidak ada pihak polres ataupun asuransi yang datang pada saat kejadian.⁹

7. Ryan Afrianto, mahasiswa yang bertempat tinggal di Jl. Alauddin, menjadi korban kecelakaan di Jl. Emmy Saelan, mengalami luka ringan dengan biaya pengobatan Rp. 1.300.000.00.-, dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Ryan bahwa tidak ada asuransi yang didapatkannya, malahan Ryan juga tidak tahu tentang adanya asuransi yang seharusnya didapatkan sebagai korban.¹⁰

⁷Rihayat, Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, *Wawancara*, 4 Maret 2015.

⁸Ravika Rahman, Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, *Wawancara*, 4 Maret 2015.

⁹ Wahyu Indra, Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, *Wawancara*, 6 Maret 2015.

¹⁰Ryan Afrianto, Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, *Wawancara*, 8 Maret 2015.

Dari hasil wawancara dari pihak PT Jasa Raharja dan wawancara masyarakat, terdapat perbedaan tentang pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan. Dimana pihak PT Jasa Raharja yang dikemukakan langsung oleh bapak Sabir selaku bagian Humas di PT Jasa Raharja Kota Makassar mengatakan bahwa pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Namun, hal yang berbeda dinyatakan oleh pihak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, pihak masyarakat menyatakan bahwa pihak PT Jasa Raharja belum melaksanakan peranannya memberikan biaya dan santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu-lintas jalan secara merata. Dalam wawancaranya, masyarakat merasa bahwa kurangnya pelayanan dari pihak PT Jasa Raharja yang menyebabkan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan biaya dan santunan.

Dalam wawancara khusus oleh Ikhsan Sudirman yang menjadi korban kecelakaan yang mengalami cacat, mendapatkan asuransi sebesar Rp. 10.000.000.00. jika dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 februari 2008 yang memberikan biaya dan santunan kepada korban cacat sebesar Rp. 25.000.000.00.-, biaya dan santunan yang didapatkan oleh Ikhsan Sudirman dari PT Jasa Raharja tidak sesuai.

Pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar dapat pula terlihat dari perbandingan antara data-data banyaknya korban kecelakaan dengan banyaknya masyarakat yang mendapatkan biaya dan santunan yang dikeluarkan oleh pihak PT

Jasa Raharja. Untuk memperjelas hal itu, penyusun mencari data-data tentang korban kecelakaan dengan banyaknya masyarakat yang mendapatkan biaya dan santunan, hasilnya adalah sebagai berikut:

Judul: Tabel data pada Sat Lantas Polrestabes, jumlah korban kecelakaan lalu-lintas di Kota Makassar tahun 2012.

Jenis cidera	Jumlah korban
Meninggal dunia	128
Luka berat	700
Luka ringan	859
Cacat tetap	5

Sumber: Sat Lantas Polrestabes kota Makassar

Judul: Tabel data, jumlah masyarakat yang mendapat biaya dan santunan dari pihak PT Jasa Raharja di Kota Makassar 2012.

Jenis cidera	Jumlah korban	Jumlah biaya dan santunan
Meninggal dunia	71	Rp 2.490.000.000,-
Luka berat	677	Rp 4.542.461.497,-
Luka ringan	16	Rp 46.249.268,-
Cacat tetap	1	Rp 10.000.000,-
penguburan	-	-
Total penyaluran santunan		Rp 7.166.210.765,-

Sumber: PT Jasa Raharja di Kota Makassar

Jika dilihat dari perbandingan tabel tahun 2012 diatas, dapat terlihat dengan jelas, bahwa banyaknya korban yang menjadi korban kecelakaan dengan banyaknya korban yang mendapat biaya dan santunan tidak seimbang, pada tabel diatas jelas terlihat bahwa jumlah korban kecelakaan lebih banyak daripada jumlah korban yang mendapatkan biaya dan santunan. Penyusun sengaja mengambil perbandingan table diatas untuk lebih memperjelas tentang pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar.

Dari hasil wawancara antara pihak PT Jasa Raharja dan pihak korban kecelakaan dengan tabel perbandingan antara jumlah korban kecelakaan dan jumlah korban yang mendapat biaya dan santunan diatas, penyusun menilai bahwa pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja belum berjalan sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu-lintas Jalan Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Penyusun melihat bahwa masih ada beberapa masyarakat yang menjadi korban kecelakaan yang tidak mendapatkan biaya dan santunan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Ada masyarakat yang mendapat santunan, namun

tidak sesuai dengan jenis kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu-lintas jalan. Dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-undang.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan PT Jasa Raharja dalam pemberian biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar belum merata. Masih ada beberapa anggota masyarakat yang tidak mendapatkan biaya dan santunan dari PT Jasa Raharja.
2. Pelaksanaan peranan dan tanggungjawab PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan, menurut para korban tidak terbuka, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya perusahaan PT Jasa Raharja di Kota Makassar. Ketidaktahuan masyarakat inilah yang membuat peranan dan tanggungjawab PT Jasa Raharja menjadi tidak merata dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi penyebab utama tidak terlaksananya peranan PT Jasa Raharja di Kota Makassar.

b. Saran

Saran yang dapat penyusun sampaikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. PT Jasa Raharja di Kota Makassar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perusahaan PT Jasa Raharja yang memberikan biaya dan santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar.
- b. PT Jasa Raharja di Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam pelaksanaan peranan dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar benar-benar melihat kerugian yang diderita korban kecelakaan sehingga pemberian biaya dan santunan diberikan sesuai dengan kerugian yang diderita korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar.
- c. PT Jasa Raharja di Kota Makassar juga dalam memberikan biaya dan santunan memperhatikan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu-lintas Jalan Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

KEPUSTAKAAN

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramadia Pustaka, 2008.
- Djemat, Gani. *Menyusun Perjanjian Leasing untuk Lessor dan Lessee*, Jakarta: Asosiasi Leasing Indonesia, 1984.
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1999
- Jasa Raharja. *Sejarah PT Jasa Raharja*. <http://www.jasaraharja.co.id> (19 November 2014)
- Mallaweng, Abdul Rahim. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, Makassar: Gunadarma, 2013.
- Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
- Purwahid, Patrik. *Hukum Perdata II*, Semarang: Undip, 1998.
- Rina, Wahyu. *Teori Peran (Rhole Theory)*. <http://www.wordpress.com> (20 April 2013).
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Tamudji, Tarsisi. *Wawasan Perasuransian*, Semarang: IKIP Semarang, 1985.

Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

Sumitra, Ronny Hanitijo. *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 tentang Jaminan Sosial

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



WARNI, Penulis lahir di Tanetea pada tanggal 16 november 1992. Putri Ke-Lima pasangan “**Baso. R** dan **Maemunah**” dari 5 bersaudara, memiliki 2 orang kakak perempuan dan dua orang kakak laki-laki.

Tinggal di Kecamatan Tamalatea dan lebih memilih bersekolah di Kecamatan Tamalatea Pendidikannya berawal di SD Negeri No. 122 Tamanroya, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Tanetea. Lalu melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Tamalatea.

Setelah lulus SMA pada tahun 2010, pendidikannya di lanjutkan lagi di perguruan tinggi yang bernama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR atau yang biasa disebut UIN Alauddin Makassar dan mengambil jurusan ILMU Hukum di Fakultas SYARIAH dan HUKUM.